

ABSTRAK

Anisia, 19382012115. Judul: *“Fenomena Perjodohan Anak Perspektif Hukum Progresif dan Undang-undang Nomor 12 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang),”* Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: M. Haris Hidayatulloh, M. SEI.

Kata Kunci: Perjodohan Anak, Hukum Progresif, UU No.12 TPKS

Penelitian ini berlatar belakang pada tradisi perjodohan dini. Telah diketahui bersama bahwa di Desa Bancelok sudah biasa terhadap tradisi perjodohan dini yang dilakukan antar orang tua untuk melaksanakan perjodohan pada anaknya, tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari pihak anak, mayoritas perjodohan dini terjadi terhadap anak perempuan. sehingga banyak anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolahnya. Orang tua memaksa menjodohkan anaknya dengan berlandaskan adat istiadat yang sudah ada sejak jaman nenek moyang. Oleh sebab itu, orang tua merasa yakin bisa memilih calon untuk anaknya demi masa depannya.

Dalam penelitian ini terdapat fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana proses perjodohan anak di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang? 2) Bagaimana perjodohan anak perspektif hukum progresif dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*Case Study*). Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur, observasi non partisipan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Masyarakat Desa Bancelok sudah terbiasa dengan perjodohan anak, mayoritas perempuan, Perjodohan terjadi kepada anak dibawah umur 19 tahun, dan mengubah KK untuk nambah umur agar bisa membuat KTP, anak terpaksa menerima perjodohan karna bentuk patuh terhadap orang tua, orang tua menjodohkan anaknya karna unsur kekerabatan dan harta yang tidak ingin jatuh ke tangan keluarga lain, juga tidak ingin anaknya sangkal, beberapa diantaranya rentan waktu tertentu dalam adanya keharmonisan dan keromantisan rumah tangga. 2) fenomena perjodohan anak menimbulkan adanya ketidakadilan terhadap hak anak, dalam hal ini sangat bertolak belakang dengan hukum progresif, dimana hukum progresif disini hukum yang mencari keadilan dan kebenaran atau semua orang sama dimata hukum. Juga dalam Undang-Undang TPKS menjelaskan bahwa jika terjadi pemaksaan perkawinan, maka diancam pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada pasal 10 ayat 1 UU TPKS.

ABSTRACT

Anisia, 19382012115. Judul: "The Phenomenon of Child Matchmaking from a Progressive Legal Perspective and Law Number 12 Crime of Sexual Violence (in Bancelok Village, Jrengik District, Sampang Regency)," Thesis, Islamic Family Law study program, Faculty of Syari'ah, Madura State Islamic Institute, Supervisor: M. Haris Hidayatulloh, M. SEI.

Keywords: Child Matchmaking, Progressive Law, Law No.12 TPKS

This research has a background in the tradition of early matchmaking. It is well known that in Bancelok Village it is common for the tradition of early matchmaking to be carried out between parents to carry out arranged marriages for their children, without prior approval from the child's side, the majority of early matchmaking occur to girls. So many girls don't go to school. Parents force to match their children based on customs that have existed since the time of their ancestors. Therefore, parents feel confident that they can choose a candidate for their child for the sake of their future.

In this research there is a research focus, namely: 1) What is the matchmaking process for children in Bancelok Village, Jrengik District, Sampang Regency? 2) What about child matchmaking from a progressive legal perspective and the Sexual Violence Law? This research belongs to the type of qualitative empirical legal research with the approach used is a case study approach (Case Study). The research data sources used are primary and secondary data sources. The data collection procedures used in this study were semi-structured interviews, non-participant observation, and documentation.

The results of this study indicate that 1) The people of Bancelok Village are used to arranged marriages, the majority are women, Matchmaking occurs to children under the age of 19 years. And change the KK to increase the age so that you can make a KTP, children are forced to accept arranged marriages because they are obedient to their parents, parents arrange their children because of kinship and assets that do not want to fall into the hands of other families, nor do they want their children to deny, some of them are vulnerable for a certain time in the presence of harmony and romance in the household. 2) the phenomenon of child matchmaking creates injustice to children's rights, in this case it is very contrary to progressive law, where progressive law is here the law that seeks justice and truth or everyone is equal before the law. The TPKS Law also explains that if a marriage is forced, it is punishable by a maximum imprisonment of 9 years and/or a maximum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiahs) in Article 10 paragraph 1 of the TPKS Law.